

POTRET KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT JAWA BARAT DALAM HADAPI COVID-19 BAGIAN INTEGRAL KETAHANAN NASIONAL

Oleh

Silahudin¹ dan Sri Lestari².

¹STIA Bagasasi-Bandung

² STIA Bagasasi-Bandung

Email: ¹ silahudin@stiabagasasibandung.ac.id

² sri.lestari@stiabagasasibandung.ac.id

ABSTRAK

Pandemi penyakit virus corona 2019 (Covid – 19) telah menjadi fakta yang mengglobal. dalam arti, nyaris tidak ada Negara di dunia ini yang tidak terinfeksi Covid – 19. Sehingga berakibat penghentian terhadap semua aktivitas kehidupan, baik dalam konteks perekonomian, maupun lainnya. Penghentian aktivitas itu, dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid – 19, yang disandarkan pada penyelamatan umat manusia.

Seiring dengan itu, kebijakan – kebijakan Pemerintah Indonesia untuk penanganan pencegahan Covid – 19 pun terus meluncur ke publik, kendati berdampak terhadap pembatasan kegiatan – kegiatan masyarakat umumnya, dan kegiatan – kegiatan institusi – institusi pemerintah maupun privat.

Pada situasi demikian itulah, tentu saja tak terhindarkan banyak warga masyarakat terkena dampak yang tidak sederhana, seperti merasa tertekan, kefanikan sosial dan lainnya. Survei ini ingin memotret ketahanan sosial masyarakat Jawa Barat dalam hadapi Covid – 19 sebagai bagian integral ketahanan nasional. Hasil survei, memang menunjukkan bahwa dimensi kemampuan mengidentifikasi dan mengelola (menyelesaikan) persoalan, kemampuan menyesuaikan diri pada keadaan tak mementu, dan dimensi kemampuan berubah dan menyesuaikan tuntutan kondisi yang juga berubah dengan adanya pandemi Covid – 19 sangat berarti sebagai indikator ketahanan sosial masyarakat.

Kata Kunci: Ketahanan sosial, Ketahanan nasional, Pandemi Covid – 19, Kebijakan PSBB

PENDAHULUAN

Tidak ada yang lebih khawatir dewasa ini, kecuali khawatir terhadap corona virus disease 2019 (disebut dengan Covid – 19). Covid – 19 sejak awal mula berkecamuk di Wuhan Cina, Hubei, Tiongkok, dewasa ini sudah merongorong hampir semua negara, tidak terkecuali negara Indonesia.

Jumlah pasien yang mulai terjangkit virus corona ini, memang terus bertambah dari hari ke harinya, sehingga di satu sisi membuat kekhawatiran masyarakat, dan di sini lain, juga membuat dampak yang tidak sederhana dalam hidup kehidupan.

Virus corona SARS-CoV-2, penyebab pandemi Covid-19 pertama kali diketahui menyebar di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Beberapa pekan setelah itu, dengan cepat wabah Covid-19 menyebar dan topik corona mulai menjadi pembahasan di berbagai media seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan pemerintah di setiap negara pun berusaha semaksimal mungkin menekan angka penularan. Segala upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan. Hingga saat ini, penyebaran virus corona telah mengekspansi lebih dari 200 negara, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia baru mengonfirmasi kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020. Sejak saat itu, banyak kebijakan dan strategi dibuat dalam rangka mencegah transmisi dan kematian signifikan akibat penyakit ini. Memang, tak terhindarkan pula, segala kebijakan dan strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia tak luput dari aneka respons dan persepsi yang diberikan masyarakat.

Virus yang dikabarkan bermula di Wuhan, Hubei, Tiongkok, kini mulai merongrong beberapa daerah di Indonesia. Jumlah pasien yang secara positif terjangkit oleh virus Corona (Covid-19) terus bertambah dari hari ke hari (Baca: saat survei ini dilakukan Mei 2020).

Melihat situasi penyebaran virus corona yang massif, dan berdampak tidak hanya pada aspek kesehatan, justru dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti persoalan kehidupan sehari – hari masyarakat dalam mencari nafkah, dan aktivitas- aktivitas lainnya, yang dapat menjadi kerentanan sosial.

Dengan adanya penyebaran virus corona yang massif tersebut, sudah barang tentu harus disikapi oleh semua lapisan masyarakat, pertama dan terutama pemerintah, bahwa virus tersebut berakibat terhadap ketahanan jiwa seseorang atau masyarakat pada umumnya, karena berbagai kegiatan dibatasi. Dengan adanya social distancing (pembatasan interaksi sosial secara primer atau langsung), dan physical distancing (pembatasan fisik), sedangkan di satu sisi bahwa kondarati manusia tidak bisa hidup menyendiri.

Situasi demikian, disadari atau tidak, sangat dibutuhkan suatu mental yang kuat, dan semangat gotong-royong atau solidaritas sebangsa menjadi élan vital dalam memerangi penyebaran virus corona (Covid – 19) di satu pihak, dan di pihak lain, mengurangi beban hidup kehidupan warga masyarakat terdampak pandemi Covid – 19. Karena itulah, konsistensi pemerintah khususnya dalam mengurangi beban hidup kehidupan masyarakat sangat urgen dibutuhkan.

Atas dasar inilah, memotret ketahanan sosial masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya warga masyarakat Jawa Barat, menjadi penting di tengah arus penyebaran virus corona yang massif, dan berdampak terhadap kehidupan sehari – hari masyarakat yang tak menentu. Survei ini berusaha mengetahui bagaimana potret ketahanan sosial masyarakat Jawa Barat dalam menghadapi Covid – 19, dan seberapa besar pengetahuan, pemahaman, partisipasi dan kemampuan masyarakat menyesuaikan keadaan yang tak menentu ini.

KAJIAN TEORITIS

Pandemi penyakit corona virus 2019 (Covid – 19), nyaris meluluhlantahkan berbagai dimensi kehidupan. Covid – 19 ini, pertama kali diberitakan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Situasi dan kondisi pandemi ini telah menyebabkan “kevakuman” atau penghentian berbagai aktivitas, pertama – tama aktivitas ekonomi atau perekonomian di berbagai banyak Negara, termasuk Negara Indonesia.

Dengan penyebaran virus corona ini, semua orang mempunyai resiko yang sama dapat terjangkiti atau terinfeksi Covid-19. Sehingga sangat masuk akal adanya imbauan atau larangan seperti social distancing dan physical distancing di seluruh dunia umumnya, dan khususnya di Negara Indonesia. Upaya memutus rantai penyebaran Covid – 19 dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sudah barang tentu untuk menghindari terinfeksi Covid – 19 bagi warga negaranya.

Situasi dan kondisi yang nyaris pada titik nadir penghentian aktivitas semua aspek kehidupan, sudah barang tentu, dapat menimbulkan efek rantai terhadap masyarakat. Efek rantai tersebut adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), keresahan atau gangguan sosial, terganggunya mata pencaharian sehari – hari, dan lain sejenisnya. Oleh karena itu, stimulus untuk bertahan hidup dan kehidupan masyarakat sangat urgen diperhatikan dan diprioritaskan. Dan pemerintah memang telah mengeluarkan berbagai jenis stimulus atau program – program sosial, seperti kartu pra kerja, program bantuan sosial (bansos), perlindungan sosial dan lain sebagainya, tentunya disandarkan bagi penyelamatan hidup dan kehidupan masyarakat.

Bahkan Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) sebagai Bencana Nasional. Oleh karena dahsyatnya penyebaran penyakit virus corona ini, baik pemerintah berbagai tingkatan maupun lapisan warga masyarakat, sudah sejatinya bahu membahu untuk menanganinya, sehingga Covid – 19 ini cepat teratasi.

Dalam keadaan demikian, sudah barang tentu setiap orang atau individu, kelompok atau komunitas, harus mampu bertahan dalam menghadapinya, dan dituntut untuk saling membantu, atau kepedulian terhadap entitas sosial. Dengan demikian, ketahanan sosial dalam pergaulan dan pergumulan kehidupan negara bangsa ini, mesti menjadi bagian yang tak terpisahkan, khususnya dalam situasi seperti dewasa ini bencana nonalam (Covid-19).

Dalam bingkai ini, ketahanan sosial (social resilience) warga masyarakat menjadi penting. Ketahanan sosial (social resilience) menurut Laurie Leitch (2020) dalam artikelnya berjudul "An Introduction to the Social Resilience Model" adalah "The timely capacity of individuals and groups—family, community, country, and enterprise—to be more generative during times of stability and to adapt, reorganize, and grow in response to disruption." (Ketahanan Sosial adalah kapasitas (kemampuan) tepat waktu individu dan kelompok - keluarga, komunitas, negara, dan perusahaan secara tepat waktu, untuk menjadi lebih generatif selama masa stabilitas dan untuk beradaptasi, mengatur kembali, dan tumbuh sebagai respons terhadap gangguan).

Keck dan Sakdapolrak (2013), menjelaskan ketahanan sosial dengan menekankan terhadap entitas sosial (baik sebagai individu, organisasi, maupun komunitas) dan kemampuannya atau kapasitasnya untuk mentolelir, menyerap, mengatasi, dan menyesuaikan diri dari berbagai jenis ancaman lingkungan dan sosial. Selanjutnya, Keck dan Sakdapolrak (2013) mendefinisikan ketahanan sosial yang terdiri dari tiga dimensi: 1. Coping capacities, yaitu kemampuan aktor

sosial untuk mengatasi dan menyelesaikan segala macam masalah; 2. Adaptive capacities, yaitu kemampuan untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menyesuaikan diri dengan tantangan masa depan dalam kehidupan sehari-hari; 3. Transformative capacities, yaitu kemampuan untuk merangkai lembaga yang mendorong kesejahteraan individu dan ketahanan masyarakat yang berkelanjutan terhadap krisis di masa depan.

Adapun menurut Betke (2002), ketahanan sosial adalah kemampuan suatu komunitas dalam mengatasi berbagai resiko perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang mengelilinginya.

Dengan demikian, ketahanan sosial, merupakan kemampuan individu atau kelompok untuk secara tepat bertindak, beradaptasi, dan mengatur diri dan aktif terlibat dalam merespons kondisi yang tak menentu. Ketahanan sosial merupakan bagian integral atau tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Dengan demikian, seperti halnya ketahanan ekonomi, politik, budaya dan hankam sebagai unsur pembentuk ketahanan nasional.

Selain itu, Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran - 5 - Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah dan dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat

Secara dasariah konseptual ketahanan sosial (social resilience) adalah merupakan kondisi suatu bangsa yang menggambarkan kemampuan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dan tantangan. Dengan kondisi aktual yang tengah terjadi dan memang sangat beresiko terjadi kefatalan terinfeksi, yaitu : pertama, dibutuhkan kemampuan mengatasi dan pulih dari ancaman dengan sumber daya yang tersedia, dan kedua, secara rasional kemampuan pemulihan atau adaptasi dengan yang disebut kebiasaan atau kewajaran baru (new normal).

METODE PENELITIAN

Survei ini dikhususkan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat yang meliputi 27 (dua puluh tujuh) kabupaten/kota. Pelaksanaan survei dimulai awal Mei hingga 3 Juni 2020, dengan bertujuan memotret “ketahanan sosial sebagai bagian integral ketahanan nasional (pertahanan semesta)” atas persoalan yang tengah dihadapi negara dan bangsa Indonesia dewasa ini khususnya, dan umumnya di belahan negara.

Metode penelitian atau survei yang digunakan bersifat campuran, untuk menggambarkan data primer dan menaksir berbagai subyektivitas (sikap atau persepsi) masyarakat Jawa Barat, dengan teknik pengumpulan data primernya melalui kuesioner yang didistribusikan kepada seluruh

masyarakat Jawa Barat melalui media sosial atau jejaring whatsapp berteman. Pengumpulan kuesioner dari responden setelah mengisinya, dan selanjutnya mengirim ulang via google form yang dibuat secara ketat, dalam arti setiap responden hanya dapat mengisi kuesioner satu kali, dalam arti, tidak dapat mengisi dua kali.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Potret Ketahanan Sosial Masyarakat Jawa Barat Hadapi Covid - 19

Ketika persebaran *Corona Virus Disiese 2019* (yang dikenal dengan Covid - 19) diumumkan Maret 2020 di Indonesia, tentu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspeknya. Bukan saja aspek menyangkut kesehatan, namun juga mendera terhadap aspek - aspek kehidupan lainnya, seperti interaksi antara orang dengan perorangan, interaksi antara orang dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dalam bidang - bidang sosial, budaya, perdagangan, ekonomi dan lain sejenisnya.

Penyebaran pandemi Covid-19 yang massif tersebut, membuat pemerintah menganjurkan warga negara untuk “kerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah”. Itu semua dilakukan dalam rangka untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Pandemi Covid-19 pun secara sadar atau tidak, sejatinya merupakan musuh bersama bangsa dan Negara Indonesia dewasa ini. Karena itulah perlu dihadapi dengan “ketahanan sosial” sebagai bagian strategi ketahanan nasional (pertahanan semesta).

Dalam situasi bencana nonalam yang bersifat nasional inilah, hal penting kemampuan warga masyarakat berfungsi bersama - sama dalam mengatasi atau menanggulangi masalah (bencana nonalam) dewasa ini. Menghadapi situasi dan kondisi yang nyaris berhenti semua aktivitas, secara sadar atau tidak, dapat membawa kejenuhan yang tinggi, tekanan moral, traumatik, karena disebabkan kurang mampu atau mengimbangi perubahan yang terjadi dengan adanya bencana nonalam bernama penyebaran pandemi Covid - 19, sehingga sangat membutuhkan energi yang kuat dalam menyikapi situasi yang tidak menentu.

Survei ini dilakukan terhadap masyarakat Jawa Barat dalam rangka memotret yang dikaitkan dengan “ketahanan sosial” merupakan bagian integral “Ketahanan Nasional”. Berdasarkan hasil potretan melalui kuesioner yang *dishare* atau didistribusikan kepada semua lapisan masyarakat melalui media sosial (*whatsapp*) dari satu tangan ke tangan lainnya, dapat terekam 19 (sembilan belas) kabupaten/kota di Jawa Barat yang merespon survei tersebut.

a. Demografi responden

Berdasarkan hasil survei melalui kuesioner yang terkumpul, di bawah ini dapat dideskripsikan sebagai berikut.

Tabel 1: Usia Responden

No	Usia	Persentase (%)
1	Kurang dari 20 tahun	4,20
2	20 – 40 tahun	60,50
3	40 – 60 tahun	34,45
4	Di atas 60 tahun	0,84

Sumber: Hasil survei penulis, Mei 2020

Seiring dengan gambaran usia responden yang terekam tersebut di atas, selanjutnya, dapat terdeskripsikan berbagai profesi atau pekerjaan responden tersebut sebagaimana dapat disimak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2: Jenis Profesi Responden

No	Jenis Profesi	Persentase (%)
1	PNS/ASN	10,8
2	Pensiunan	0,84
3	Pegawai Swasta	19,33
4	Wiraswasta	7,56
5	Professional	0,84
6	Pendidik/dosen	8,40
7	BUMN/BUMD	0,84
8	Guru Honorer	0,84
9	Konsultan	0,84
10	Mahasiswa/Pelajar	8,40
11	Operator sekolah	0,84
12	Transportasi online/Ojol	1,68
13	Pendamping PKH & Sosial	1,68
14	Perangkat Desa	8,40
15	Staf administrasi	0,84
16	Lainnya	27,73

Sumber: Hasil survei penulis, Mei 2020

Profesi atau pekerjaan responden yang beraneka ragam itu, tersebar di 19 (sembilan belas) kabupaten/kota yang terkumpul mengirimkan kuesioner, sebagaimana dapat disimak pada wilayah survei seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

Adapun kabupaten/kota yang terekam dari hasil survei dapat disimak pada tabel di bawah ini

Tabel 3: Wilayah (domisili) Responden

No	Nama Kabupaten/Kota	Persentase (%)
1	Kab. Bandung	11,76
2	Kab. Bandung Barat	4,20
3	Kab. Bogor	1,68
4	Kab. Ciamis	0,84
5	Kab. Cirebon	0,84
6	Kab. Garut	3,36
7	Kab. Indramayu	1,68
8	Kab. Karawang	1,68
9	Kab. Kuningan	22,69
10	Kab. Purwakarta	0,84
11	Kab. Subang	10,08
12	Kab. Sumedang	0,84
13	Kab. Tasikmalaya	0,84
14	Kota Bandung	27,73
15	Kota Bekasi	0,84
16	Kota Bogor	1,68
17	Kota Cimahi	5,88
18	Kota Depok	1,68
19	Kota Sukabumi	0,84

Sumber: Hasil survai penulis, Mei 2020

b. Social Distancing dan Physical Distancing

Sikap dasariah manusia sesungguhnya sebagai makhluk sosial, tidak bisa diisolasi atau terisolasi secara terus menerus. Manusia membutuhkan interaksi dengan sesamanya secara langsung (*primer*). Interaksi sosial dalam bahasa sosiologi ada interaksi primer (langsung) dan ada interaksi sekunder (melalui perantara) seperti dewasa ini interaksi melalui perantara tersebut, adalah via facebook, whatsapp, atau handphone, dan lain sejenisnya.

Seiring dengan terjadinya bencana wabah yang mengglobal (mendunia), yaitu pandemi *corona virus desiese 2019* (Covid-19), pertama – tama mencuat di Wuhan – China. Selanjutnya, bahwa pandemi Covid-19 tersebut pada realitasnya menimpa berbagai belahan negara. Dalam bahasa lain, nyaris tidak ada negara yang tidak tertimpa oleh penyebaran Covid-19 tersebut. Sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai salah satu badan dari Perserikan Bangsa – Bangsa (PBB) mengumumkan bahwa Covid-19 merupakan pandemi yang bersifat global.

Dalam kenyataan itulah, karena Covid – 19 ini penyebaran sangat massif, dan bahkan dapat mematikan, maka khususnya Negara Indonesia, awal – awalnya pemerintah sifatnya

melakukan himbauan terhadap semua lapisan atau elemen masyarakat untuk “belajar di rumah”, “bekerja di rumah”, dan “beribadah di rumah”.

Berbagai himbauan pemerintah, berlanjut kepada pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait penanganan pencegahan Pandemi Covid-19. Dalam rangka untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, semua lapisan masyarakat diimbau agar melakukan apa yang dikenal dengan istilah “*social distancing*” (pembatasan sosial) dan “*physical distancing*” (pembatasan jarak fisik). Sudah barang tentu himbauan tersebut, disadari atau tidak berdampak terhadap aktivitas rutin kehidupan masyarakat umumnya, seperti berdagang di pasar – pasar tradisional, berjualan di sekolah – sekolah, dan kegiatan – kegiatan lain sebagai mencari nafkah, seperti transportasi online (ojek online). Begitu pun kegiatan di kantor – kantor, baik kantor pemerintahan, maupun swasta, semuanya harus mentaati himbauan bahkan larangan yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 yang massif dan mematikan.

Gambaran berdasarkan hasil survei terkait dengan kepedulian dan kesadaran masyarakat “membatasi kontak dengan orang lain di luar rumah”, “jauhi tempat – tempat keramaian”, “hindari pertemuan massal”, dan “tidak berkumpul dengan kelompok”, dalam rangka memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19, terdeskripsikan bahwa kepedulian dan kesadaran semua lapisan masyarakat tinggi sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4: Social dan physical distancing

Pertanyaan	Sangat besar	Besar	Sedang	Kecil	Sangat kecil
Membatasi kontak dengan orang lain di luar rumah	48,74%	38,66%	11,76%	0,84%	0
Jauhi tempat – tempat keramaian	54,62%	36,97%	7,56%	0	0,84%
Hindari pertemuan massal	57,14%	33,61%	8,40%	0,84%	0
Tidak berkumpul dengan kelompok	57,98%	32,77%	6,72%	2,52%	0
Rerata	54,62	35,50	8,61	1,05	0,21

Sumber: Hasil survei penulis, Mei 2020

Social distancing dan *physical distancing*, di samping membatasi kontak dengan orang lain di luar rumah, yang tidak kalah urgennya adalah terkait pula dengan tempat – tempat keramaian (atau berkumpulnya orang – orang), seperti pasar, mall, dan lain sejenisnya. Jauhi tempat – tempat ramai dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 ini pun sangat penting. Oleh karena tempat – tempat seperti disebutkan di atas tadi, merupakan banyak berkumpulnya masyarakat dalam

rangka memenuhi berbagai kepentingannya. Begitu cepatnya penularan Covid – 19 ini, sehingga untuk memutus rantai penyebarannya pun, perlu bahkan harus menghindari pertemuan – pertemaun yang sifatnya massal. Hal ini sangat penting dipahami dan disadari serta ditaati oleh semua lapisan masyarakat dimanapun.

Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup tanpa berkelompok, sekecil apa pun kelompok tersebut. Akan tetapi, dalam situasi dan kondisi penyebaran Covid-19 yang massif dan akselerasi penyebarannya begitu cepat, dan membahayakan terhadap aspek kehidupan, pertama dan terutama kesehatan. Maka dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 secara signifikan, mau tidak mau pengorbanan atau mungkin juga mengorbankan untuk tidak melakukan kegiatan berkelompok menjadi salah satu bagian integral atau tidak terpisahkan dalam mutus rantai penyebaran Covid-19 tersebut.

Pratik – praktik *social distancing* dan *physical distancing* dalam kehidupan masyarakat pada suasana keadaan pandemi Covid – 19 ini, masing – masing berada dalam posisi sangat besar nilai rata- ratanya sebesar 54,62 persen untuk melaksanakan *social distancing* dan *physical distancing*.

Kepedulian dan kesadaran semua elemen atau lapisan masyarakat terkait dengan *social distancing* dan *physical distancing*, bukan tanpa dasar atau alasan yang tidak bisa diterima, justru sangat bisa diterima oleh akal sehat. Alasan – alasannya, yang disertai harapan sebagaimana terekam atau temuan dari hasil survei, meliputi dimensi yang sangat signifikan untuk menjadi perhatian kita semua

Penyebaran virus corona atau dikenal dengan Covid-19 yang sangat massif dan cepat penularannya, bahkan dapat mematikan, maka alasan – alasan yang disertai dengan harapannya dalam hal kesehatan dari hasil temuan survei dapat dicermati sebagai berikut.

- Covid 19 berharap segera berakhir, karena dengan virus tersebut membawa dampak yang luar biasa pada semua aspek kehidupan, karenanya memutus sebanyak mungkin mata rantai penyebarannya sangat penting, dengan berbagai cara seperti menjauhi kerumunan merupakan usaha sederhana untuk memutus rantai penyebaran virus corona, serta menghimbau untuk tetap di rumah saja, dan menunda sementara keinginan – keinginan untuk (seperti mudik) demi kesehatan keluarga.
- Agar penyebaran Covid – 19 cepat berlalu, dan keadaan di dunia bisa kembali membaik atau normal, wajib mengikuti segala cara yang dianjurkan pemeirntah. Karenanya, protokol kesehatan patut ditaati.
- Agar rantai penularan covid-19 menjadi putus sehingga bisa hidup seperti sedia kala kembali walaupun dengan protokol kesehatan, budaya lanjutkan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan tidak banyak berkumpul, sangat penting untuk menjaga kesehatan keluarga, dan masyarakat.

- Bersatu memerangi wabah yang melanda dengan mengikuti protokol kesehatan dan anjuran pemerintah. Baik anjuran maupun kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait untuk memutus rantai Covid-19, ditujukan dalam kepentingan mengakhiri penyebaran virus Covid-19 tersebut.

Memang, dengan pandemi Covid – 19, bukan saja soal kesehatan, namun nyaris melumpuhkan semua dimensi kehidupan telah berpengaruh terhadap kehidupan – kehidupan lainnya, terlebih dalam soal sosial ekonomi lapisan masyarakat.

Temuan survei dapat terekam persoalan harapan – harapan lapisan masyarakat agar keadaan sulit akibat pandemik ini cepat selesai. Oleh karena kegiatan – kegiatan bisnis atau usaha lapisan masyarakat di berbagai jenis sangat terdampak, dan usahanya tidak bisa berjalan seperti biasanya. Karenanya, jelas salah satu responden, “saya dan keluarga sepakat untuk melakukan *social distancing* untuk memutus rantai penyebaran virus corona.” Di samping itu, yang lebih berbahaya dari virus adalah kepanikan massa yang mengakibatkan kelangsungan hidup tidak terkendali. Ini adalah dampak terburuk dari sebuah wabah.

“*Social distancing* merupakan salah satu upaya untuk mencegah penularan covid 19, tetapi di Indonesia ini tidak bisa berjalan optimal karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih dihadapkan pada persoalan kebutuhan dasar yang tidak bisa dipenuhi, sementara negara yang sangat diharapkan hadir membantu masyarakat seolah melepas tanggung jawab tersebut,” jelas responden.

Sebagai warga Negara, prinsipnya ingin membantu berkontribusi dalam membantu memutus rantai penyebaran Covid-19 setidaknya dengan membantu semaksimal mungkin dalam penekanan PSBB saat ini, tapi karena seperti dikatakan responden, “saya seorang pedagang, dengan terpaksa ada waktu tertentu harus ke luar rumah seperti ke pasar atau berjualan di kedai.”

Melihat kondisi dan situasi yang tengah dihadapi oleh semua pihak dewasa ini, maka harapan warga masyarakat, agar keadaan di dunia umumnya dan khususnya di Negara Indonesia bisa kembali membaik. Masyarakat, berharap mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, meskipun jelas responden, “saya juga faham bahwasanya masyarakat yang masih harus bekerja guna memenuhi kebutuhan sehari – hari sangat sulit untuk mematuhi peraturan – peraturan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.” Dan lanjutnya dengan mengutip pernyataan Presiden Ghana, berpesan “Lebih baik ekonomi yang sementara mati atau nyawa yang tidak akan pernah kembali.” Karena itulah, pemerintah dalam mendistribusikan bantuan – bantuannya harus transparan, dan prioritaskan terhadap warga yang sangat membutuhkannya.

Sesuai dengan anjuran dan mungkin atas dasar penelitian bahwa dengan menjaga jarak bisa mempercepat putusnya penyebaran covid 19, perlu didukung kebijakan – kebijakan pemerintah dalam hal ini. Bahkan salah satu responden mengatakan, “Saya sebagai ketua RT, mendukung upaya pemerintah dalam memutus covid 19.”

Partisipasi dari masyarakat demi mempercepat penanganan pandemi covid - 19, menjadi bagian integral, dengan peran pemerintah yang harus lebih bijak lagi dalam menentukan sebuah kebijakan. Oleh karena harapan masyarakat, “badai pandemi semoga cepat berlalu.”

c. Ketahanan Sosial Bagian Integral Ketahanan (Pertahanan) Nasional

Ketahanan sosial suatu masyarakat dimana pun, kapan pun, sesungguhnya sangat penting eksistensinya dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi, seperti dewasa ini, yaitu pandemi *corona virus desiese 2019* (Covid-19) yang akselerasi penyebaran dan penularannya sangat cepat dan massif, bahkan membuat lapisan masyarakat pun khawatir dan panik.

Karena itulah, dengan berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan memutus rantai penyebaran Covid-19, seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sudah barang tentu disadari atau tidak oleh semua lapisan masyarakat, sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap pergaulan dan persoalan – persoalan berbagai aspek kehidupan sehari – hari, seperti perdagangan (skala besar atau kecil), perekonomian masyarakat, sosial dan budaya, serta lainnya. Pendek kata, berbagai aktivitas kebutuhan masyarakat terganggu.

Mengidentifikasi dan mengelola persoalan – persoalan tersebut, sudah sejatinya memang harus dilakukan oleh siapapun dalam rangka upaya mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Dalam ketahanan sosial, dapat dilihat dari dimensi “menyesuaikan diri pada kondisi tak menentu”. *Corona virus Desiese 2019* (Covid-19) ini, secara sadar atau tidak, berdampak terhadap situasi dan kondisi yang cemas dan mengkhawatirkan semua lapisan masyarakat, tanpa kecuali. Situasi dan kondisi yang tak menentu ini pun, bisa membawa pada keadaan kacau atau kekacauan sosial (*social chaose*) yang tidak diharapkan oleh semua, termasuk oleh penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, memotret keadaan masyarakat dapat menyesuaikan diri pada kondisi dewasa ini (Covid-19) atau pinjam bahasa Presiden Joko Widodo, “berdamai dengan Covid-19”, tampak sangat krusial sebagai bagian dari ketahanan sosial.

Ketahanan sosial suatu masyarakat negara bangsa di samping mengidentifikasi dan mengelola persoalan, dan menyesuaikan diri pada kondisi tak menentu, juga dimensi lainnya, yaitu “kemampuan berubah dan menyesuaikan tuntutan kondisi yang juga berubah” sebagai bagian integral ketahanan sosial, dalam menghadapi penyebaran virus Covid-19 dewasa ini.

Ketahanan sosial suatu masyarakat sangat penting oleh karena itu, merupakan kondisi aktual ketahanan nasional pula. Jadi keberadaan jaringan sosial masyarakat merupakan elemen – elemen ketahanan sosial tersebut perlu jadi perhatian negara (dalam hal ini pemerintah). Titik balik ketahanan sosial adalah kontributif terhadap ketahanan nasional (atau pertahanan semesta sebagaimana sistem pertahanan yang dianut negara Indonesia berdasarkan konstitusi UUD NRI 1945).

Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengelola persoalan, menyesuaikan diri pada kondisi tak menentu, dan kemampuan berubah dan menyesuaikan tuntutan kondisi yang juga berubah, dengan kehadiran wabah Covid – 19 ini yang menakutkan dan mengkhawatirkan semua lapisan masyarakat, hasilnya dapat disimak dari hasil survei ini.

Tabel 5 : Dimensi Ketahanan Sosial

Pertanyaan	Sangat besar	Besar	Sedang	Kecil	Sangat kecil
Dimensi mengidentifikasi dan mengelola persoalan	22,69 %	44,54 %	30,25 %	2,52 %	0
Dimensi menyesuaikan diri pada kondisi tak menentu	29,41 %	48,74 %	19,33 %	2,52 %	0
Dimensi kemampuan berubah dan menyesuaikan tuntutan kondisi yang juga berubah	29,41 %	39,50 %	28,57 %	1,68 %	0,84%
Rerata	27,17	44,26	26,05	2,24	0,28

Sumber: Hasil survei penulis, Mei 2020

Berdasarkan hasil survei, yang terekam sebagaimana pada tabel di atas, memiliki alasan – alasan kontributifnya bagi ketahanan sosial. Hasil temuan survei bahwa masyarakat Jawa Barat berkontribusi dalam rangka mutus rantai virus corona dan sekaligus mempertahankan hidup dan kehidupannya, terekam pada matrik di bawah ini.

Matrik 1: Dimensi Ketahanan Sosial

Dimensi kemampuan mengidentifikasi dan mengelola persoalan	Dimensi kemampuan menyesuaikan diri pada keadaan tak menentu	Dimensi kemampuan berubah dan menyesuaikan tuntutan kondisi yang juga berubah
Berusaha menyesuaikan diri dalam upaya mempertahankan hidup dan kehidupan untuk pribadi, keluarga, bahkan, sebisa mungkin membantu orang lain atau sekitarnya secara bersama – sama	Kontribusinya berusaha menyesuaikan diri dalam upaya mempertahankan hidup dan kehidupan untuk pribadi, keluarga, serta sebisa mungkin bantu untuk orang lain (kurang mampu).	Berusaha menyesuaikan diri dalam upaya mempertahankan hidup dan kehidupan untuk pribadi, keluarga, dan sebisa mungkin bantu untuk orang lain.
Cepat beradaptasi dengan lingkungan dan keadaan, dengan senantiasa mengikuti berita uptodate tentang perkembangan pandemi covid – 19, dan ikutserta mensosialisasikan anjuran dan himbauan pemerintah	Kontribusi utama, yaitu mengikuti anjuran yang sudah menjadi ketentuan pemerintah.	Beradaptasi dengan keadaan seperti ini, dan berusaha mengikuti informasi uptodate tentang perkembangan pandemi.
Persoalan ketahanan sosial, kesehatan, pendidikan, kerawanan sosial dan pelayanan sosial dasar masih belum optimal diatasi sehingga kondisi ketahanan sosial sebagian besar masyarakat Indonesia (umumnya) masih menjadi persoalan yang harus dicarikan solusinya. Jika ketahanan sosial masyarakat kuat maka persoalan selanjutnya akan mudah diatasi karena pelayanan sosial dasar	Cepat beradaptasi dengan lingkungan dan keadaan, juga senantiasa mengikuti berita uptodate tentang perkembangan pandemi ini.	Memberikan informasi yang benar kepada orang terdekat khususnya, tetap berada di rumah jika tidak ada keperluan mendesak, jika terpaksa keluar rumah tetap melakukan proteksi dengan memakai masker, sarung tangan dan menjaga jarak, serta mengikuti informasi terkini tentang

masyarakat merupakan kunci dari pertahanan semesta.		perkembangan covid 19 yang real.
Memberikan edukasi tentang bahaya pandemi kepada beberapa kelompok masyarakat di sekitar	Setiap individu dan seluruh masyarakat harus bertanggungjawab untuk keselamatan semua pihak.	Mengingatkan orang-orang yang bertemu untuk rajin mencuci tangan dan memakai masker ketika memang ada keperluan keluar rumah yang mendesak.
Melaksanakan protokol kesehatan, dengan menggunakan masker saat keluar, menghindari tempat-tempat keramaian yang bersifat kumpulan masa, dan rajin mencuci tangan, dan mensosialisasikan baik melalui media social, dan media – media konvensional lainnya.	Mentaati apa yang menjadi intruksi pemerintah sesuai protokol kesehatan dengan bekerja, belajar dan beribadah di rumah, walaupun dirasa sangat berat.	Sinergi dan aksi bersama antar lembaga pemerintah dengan melibatkan masyarakat sipil.
Prioritaskan menyelamatkan nyawa manusia, cepat bertindak memastikan dilakukan tes secara luas, kepastian pemberian layanan kesehatan, dan isolasi terhadap yang terkena virus corona.	Menjaga kebersihan diri dengan selalu mencuci tangan dan selalu menggunakan masker saat ke luar, menghindari tempat-tempat keramaian yang berpotensi terjadinya kerumunan (kumpulan) masa.	
Patuh kepada protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah dan berkontribusi membantu kepada mereka yang terdampak secara sosial ekonomi.		
Covid - 19 adalah masalah dunia, dampak yang terjadi di seluruh dunia sangat jelas dari		

berbagai media informasi. Sebagai warga Negara Indonesia yang juga terdampak langsung tentu saja harus menjadi bagian yang penting dalam menyikapi secara positif atas semua kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan Covid - 19.		
---	--	--

Sumber: hasil survey penulis, Mei 2020

2. Pemetaan Subyektivitas Masyarakat untuk Masyarakat dan Pemerintah

Rakyat dalam bahasa politik adalah merupakan penopang dan sekaligus pendukung terhadap persoalan – persoalan kehidupan apa pun. Oleh karena itu, dukungan lapisan masyarakat dalam memutus rantai penyebaran virus corona, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam merajut solusi penyebaran Covid – 19.

Seiring dengan gambaran hasil survei yang tergambar di atas, baik soal terkait dengan *social distancing* dan *physical distancing* serta dimensi – dimensi ketahanan sosial sebagai bagian integral ketahanan (pertahanan) nasional, berdasarkan temuan survei (subyektivitas lapisan masyarakat) baik itu berupa masukan, maupun harapan yang ditujukan terhadap pemerintah dan masyarakat dalam menangani pencegahan dan memutus rantai penyebaran Covid – 19, adalah dapat disimak di bawah ini.

a. Dari masyarakat untuk masyarakat

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Mei 2020, terekam masukan, saran, dan harapan masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri sebagaimana dapat disimak pada box di bawah ini.

Box 1: Dari Masyarakat untuk Masyarakat

Rakyat seharusnya bisa mengikuti arahan yang diberikan pemerintah untuk tetap diam di rumah, apabila memang tidak ada keperluan yang mendesak. Hal ini dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.
Warga masyarakat harus disiplin dalam mengikuti anjuran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), agar wabah ini tidak berkepanjangan.
Sikap konsisten dan komitmen dari semua pihak baik itu pemerintah dan rakyat sangat diperlukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona melalui PSBB. Dengan demikian, semua dampak bisa segera tertangani, khususnya kondisi ekonomi bisa dipulihkan.

Menjaga diri sendiri, adalah menjaga orang lain juga. Karena, sikap masyarakat diharapkan tetap mengikuti anjuran pemerintah, dan mematuhi peraturan yang telah disepakati pemerintah.
Sikap rakyat harus benar benar peduli akan adanya PSBB sebagai suatu langkah memutus rantai virus dengan cara berdiam diri di rumah.
Sikap kita sebagai rakyat ini harus mendukung pemerintah dalam upaya penanganan pencegahan penyebaran covid - 19, di antaranya menerapkan sikap <i>physical distancing</i> , pola hidup sehat, dan membatasi segala kegiatan di luar rumah.
Masyarakat harus mendukung dengan mengikuti apa yang sudah ditentukan pemerintah, karena yakin untuk kebaikan semua pihak dalam upaya memutus penyebaran covid 19.
Masyarakat Jawa Barat, harusnya lebih disiplin, mengikuti kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat, menjaga kesehatan dan kebersihan dan harus saling kerja sama satu sama lainnya dalam segala hal apapun.
Sikap rakyat harus menerima pada keadaan saat ini, karena bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia.
Harus ada kesadaran dari diri masing masing warga masyarakat, agar kebijakan PSBB berjalan lancar dalam upaya mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid - 19.
Rakyat seharusnya mengerti dan faham bahwa PSBB diberlakukan untuk melindungi mereka dari rantai penyebaran virus corona, namun sayang sebagian besar masyarakat kita tidak memiliki mental yang baik dalam memahami dan menjalankan instruksi ini, bahkan banyak masyarakat yang berbuat anarkis untuk melawan kebijakan pemberlakuan PSBB, misalnya dengan merusak portal, mencaci maki petugas piket dan malah mengintimidasi masyarakat lainnya untuk melawan pemerintah.
Semua warga harus yakin bahwa setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah sudah berdasarkan kajian dan semata-mata untuk melindungi warga. Jadi tidak ada alasan bagi warga untuk tidak mengikuti setiap aturan yang berlaku.
Rakyat seharusnya lebih menyadari akan bahaya Covid - 19, sehingga lebih menjaga stabilitas imunitas diri pribadi dan keluarga dalam kelompok terkecil, dengan begitu maka akan secara otomatis PSBB yang diberlakukan pemerintah pun akan berjalan sempurna.
Sikap masyarakat mentaati peraturan PSBB yang diterapkan pemerintah, walau dengan sangat terpaksa, harus taat anjuran serta memahami kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan penanganan Covid - 19.

Mengajak semua elemen masyarakat untuk mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Rakyat Jawa Barat seharusnya mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan serta tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak.

Sebagai rakyat, kita harus banyak sadar diri dan bersabar dengan kondisi saat ini yang mengharuskan untuk menjalankan semua aktivitas di rumah. Oleh karena itu, berakhir atau tidaknya pandemi ini kembali kepada kita sebagai salah satu subjek atau objek yang mungkin bisa menjadi penyebar virus tersebut pada manusia lain.

Sumber: hasil survei penulis, Mei 2020

b. Dari masyarakat untuk pemerintah

Selanjutnya, masukan, saran, dan harapan rakyat Jawa Barat terhadap pemerintah dalam hal penanganan Covid - 19, adalah sebagaimana dapat disimak pula pada box di bawah ini.

Box 2: Dari Masyarakat untuk Pemerintah

Pihak pemerintah sendiri harus peka dan peduli terhadap yang terdampak, khususnya rakyat kecil.

Terkait PSBB di Jawa Barat ini memang tidak mudah apalagi pada situasi seperti ini (dalam bulan ramadhan) bukan tidak ingin warga berdiam diri di rumah tapi mungkin karena kebutuhan hidup juga harus tercukupi masih banyak orang yang keluar rumah untuk mencari nafkah, dan banyak pula orang yang di satu pihak, secara tidak langsung mereka pun ingin pulang kampung karena sudah tidak ada pekerjaan lagi di kota, namun Pembatasan Sosial Berskala Besar membatasi orang yang akan pulang kampung karena terancam membawa virus. seharusnya pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatunya kebutuhan untuk masyarakat yang terkena dampak Covid 19.

Pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid - 19 yang semakin hari semakin meresahkan, harus bisa memberikan kejelasan tentang peraturan ini sampai ke tingkat masyarakat terendah dengan bahasa yang mudah dipahami, mengingat berbedanya tingkat pengetahuan dan pemahaman di masyarakat.

Sebenarnya dari kebijakan tersebut dikaji lagi karena kebutuhan masyarakat beragam, dan tolong kepada pihak yang menjadi wakil rakyat lebih peduli terhadap masyarakat juga.

Bantuan sosial (sembako) dari pemerintah mestinya lebih menyeluruh ke semua lapisan masyarakat dan tepat sasaran.

Pemerintah (semoga) mampu bersikap bijaksana dalam membantu rakyatnya menghadapi segala dampak dari ditetapkannya kebijakan - kebijakan seperti PSBB

Pemerintah pun seyogyanya lebih bertindak tegas dengan adanya sanksi bilamana terjadi pelanggaran baik dari warga masyarakat sendiri maupun aparat pemerintah selama PSBB berlangsung
Kebutuhan warga masyarakat yang terkena dampak langsung seharusnya disediakan dan diberikan oleh pemerintah, seperti bantuan sembako dan lainnya.
Sikap konsisten dan komitmen dari semua pihak baik itu pemerintah dan rakyat sangat diperlukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona melalui kebijakan – kebijakannya.
Adanya PSBB setuju, karena mencegah sama menekan penyebaran covid19. Tapi tentunya harus dibarengi dengan jaminan kebutuhan pangan untuk warga khususnya yang kurang mampu.
Pemerintahan selalu berusaha memberi pengertian tentang kebijakan PSBB dan berharap seluruh bagian dari Gugus Tugas Covid - 19 terus memberi pengertian terhadap orang - orang terdekat mereka bahwa PSBB bukan berarti sama sekali tidak boleh melaksanakan aktivitas di luar rumah, tapi membatasi dan membiasakan diri melakukan proteksi diri, sebagai contoh slogan "maskerku untuk kesehatanmu, dan maskermu untuk kesehatanku".
Langkah PSBB terbilang cukup telat. Ini berawal dari sifat ketenangan yang berlebihan. Mengklaim bahwa virus belum sampai ke indonesia, nyatanya virus sudah sampai jauh sebelum konfirmasi pasien positif pertama diumumkan.
Agar pemerintah lebih tegas dan tak pandang bulu, lakukan bantuan sosial melalui satu pintu. Dan seoptimal mungkin memenuhi kebutuhan semua rakyatnya.
Adanya aturan yang jelas dan baku di dalam penerapan PSBB ini. Karena dari berita dan kejadian di lapangan petugas check point masih terlihat kesulitan untuk menjelaskan kepada masyarakat yang masih ngeyel ketika diberi penjelasan.
Untuk pemerintah agar lebih bijaksana dalam memberikan perhatian kepada masyarakat apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan mereka, dan pemerintah harus konsisten memberlakukan PSBB dan berikan jaminan kebutuhan hidup selama masa darurat kesehatan masyarakat.
Dengan diberlakukannya kebijakan PSBB, pemerintah harus siap dengan konsukuensinya yaitu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terutama yang ekonomi menengah ke bawah, oleh karena dengan PSBB itu jelas semakin sulit untuk mencari kehidupan atau usaha.
Kebijakan PSBB belum ada perubahan yang signifikan dari sejak diberlakukannya, orang yang terpapar virus corona masih saja terus bertambah, belum lagi peraturan yang tidak masuk akal, seperti suami istri dilarang berboncengan padahal mereka satu rumah.

Perlunya sikap pemerintah untuk mengerti dan memahami situasi rakyatnya selama PSBB ini karena banyak kebutuhan masyarakat paling utama kebutuhan akan pangan yang sulit terpenuhi, dengan kondisi saat ini masyarakat sulit memperoleh pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari dan ini yang kurang dapat perhatian dari pemerintah.
Masyarakat pada dasarnya akan mematuhi himbauan pemerintah terkait kebijakan PSBB, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi disebabkan karena masyarakat khususnya ekonomi lemah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka terpaksa melanggar demi mencari nafkah, disatu sisi pemerintah pun berupaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut.
Kebijakan pemerintah yang terbaik untuk kita semua demi percepatan (mutus – penulis) pandemi Covid - 19 ini,, namun pemerintah juga harus secara cepat dan tepat mengambil kebijakan percepatan distribusi bantuan bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi ini.
Kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, hingga mencapai tingkat kebijaksanaan demi meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap kebijakan yang diimplementasikan.
Sebetulnya diberlakukannya PSBB sangat bagus dan bisa memutus penyebaran virus, tapi jangan hanya memikirkan dampak dari virusnya tapi harus berfikir bagaimana dampak yang akan terjadi kepada pedagang kecil yang mencari uang hanya mengandalkan dagangannya..
PSBB sebuah keputusan yang strategis karena berdampak lebih luas pada bidang POLEKSOSBUD. Dalam keadaan darurat selama diberlakukan PSBB, perlu adanya SOP yang sama di semua wilayah Jawa Barat. Dan perlu sikap yang tegas dari Pemerintah atas semua pelanggaran yang terjadi. Perbedaan SOP dapat menjadi sebuah kelemahan aparat pemerintah dan pelaksana lainnya dalam melaksanakan sebuah kebijakan pemerintah.
Berharap selain adanya himbauan kepada masyarakat terhadap pentingnya <i>social distancing</i>, seharusnya ada juga literasi terhadap masyarakat awam. Khususnya di daerah terpencil seperti perkampungan. Karena ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa yang terdampak corona itu sebagai aib, sehingga mereka merasa terkucilkan dalam bermasyarakat. Dan jika memang masyarakat paham terhadap keadaan seperti ini seharusnya ada rasa saling bantu satu sama lain sehingga menghindari munculnya polemik di masyarakat.
Pemerintah (mulai) mempublikasikan rencana dan perkembangan inventarisasi dan mekanisme pemberian bantuan kepada masyarakat tidak mampu yang terdampak Covid-19.

Pemerintah harus lebih memperhatikan kebutuhan rakyatnya supaya rakyat tetap di rumah apabila pemerintah tidak memperhatikan maka bagaimana rakyat akan patuh kalau untuk cari makan pun susah.
Ketegasan pemerintah daerah atas pemberlakuan PSBB, dan memberikan sarana prasarana informasi, komunikasi, jejaring (keselamatan) ekonomi dan pangan.
Seandainya saja pemerintah serius dalam PSBB bukan hanya judul saja, yakin akan selesai masa pandemi ini karena pada nyatanya masih banyak yang berdatangan antar kota, provinsi, dan negara yang lolos dari segi pengawasan pemerintah daerah.
Sosialisasi dan internalisasi yang masif kepada seluruh warga masyarakat serta memelihara konsistensi bersama dengan acuan regulasi yang jelas, tegas dan solutif.
Sikap pemerintah yang tegas tapi tetap peduli terhadap rakyat. PSBB hanya menghambat roda ekonomi rakyat, walaupun tetap diterapkan maka bantuan sosial dari pemerintah harus merata karena rakyat semua terkena dampak (virus tidak mengenal kaya dan miskin)
Seharusnya PSBB diberlakukan serentak di seluruh Indonesia, karena PSBB yang sudah dilakukan tidak efektif dalam penanganan penyebaran covid - 19.
Untuk pemerintah lebih semangat dan pantang menyerah menghadapi rakyat yang kurang paham ataupun membantah terus lakukan yang terbaik.
Untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar melakukan test swab massal karena penduduk Jawa Barat yang sangat banyak serta menggratiskan swab test untuk masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan swab test.
Sebagaimana yang telah diamanahkan dalam UUD 1945 bahwa pemerintah harus bisa menjamin kebutuhan rakyatnya. Seringkali, pemerintah menganjurkan untuk berdiam diri, tapi tidak ada penjaminan kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, sehingga masih banyak yang terpaksa keluar untuk mencari nafkah. Fakta lain pula, pendistribusian bantuan ini terkadang tidak tertuju pada orang - orang yang benar membutuhkan, yang mampu mendapat bantuan yang tidak mampu malah tidak mendapat bantuan.

Sumber : hasil survei penulis, Mei 2020

KESIMPULAN

Penyebaran virus corona (Covid - 19) belum usai. Karena itulah kebijakan - kebijakan dalam rangka memutus rantai penyebaran pandemi Covid - 19, terus dilakukan oleh pemerintah.

Dalam situasi pandemi Covid - 19 yang nyaris meliuhlantahkan berbagai dimensi kehidupan, sudah jelas dapat disadari ancamannya, yaitu perekonomian (nasional) akan berjalan lambat, atau mengalami perlambatan, kehidupan sosial masyarakat baik soal mata pencaharian, maupun soal - soal lainnya berantai mengiringi, yang bisa jadi tidak sehat bahkan rentan.

Bencana nasional yang bernama bencana nonalam ini, membutuhkan energi solidaritas semua lapisan masyarakat sangat urgen dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam situasi penyebaran virus corona yang massif ini, tidak hanya berpangku tangan menyerahkannya kepada pemerintah *an sich*, namun korona (Covid-19) ini, kalau diibaratkan sebagai musuh yang harus dibasmi atau dikalahkan bersama – sama.

Dengan demikian, pemerintah niscaya harus bergotong royong bekerja sama dengan elemen – elemen masyarakat luas agar kebijakan – kebijakan yang diambil putusan pemerintah seputar penanganan Covid – 19 dilaksanakan secara bersama dengan masyarakat luas. “Negara yang kuat adalah Negara yang didukung oleh rakyatnya.” Di sini, dalam situasi penyebaran virus korona yang massif, tentu saja pemerintah pusat harus memegang peran “manajemen komando” yang signifikan, dikarenakan Covid – 19 ini sudah dikatakan sebagai “bencana non alam yang bersifat Nasional”.

Dalam keadaan serba tidak menentu tentunya, kepanikan bahkan kerawasan sosial masyarakat pun tidak bisa dihindari, nilai – nilai kehidupan sosial masyarakat terganggu. Tantangannya, pemerintah harus antisipasi gejolak sosial yang tidak diinginkan, dan pihak masyarakat pun dibutuhkan adanya ketahanan sosial, dengan tidak bersifat egois hanya mempertimbangkan kepentingan atau bahkan keuntungan pribadi. Karena itu, kemampuan mengidentifikasi dan mengelola persoalan, menyesuaikan diri dalam keadaan tidak menentu, dan kemampuan berubah dan menyesuaikan tuntutan kondisi yang juga berubah, sebagai dimensi ketahanan sosial (bagian integral ketahanan nasional) dalam hadapi bencana non alam bernama Pandemi Covid – 19, aktualisasinya menjadi momentum yang signifikan.

REFERENSI

- Betke, Friedhelm, 2002. Statistik Ketahanan Sosial : Menuju Operasionalisasi Konsep Baru Dalam Bidang Statistik Sosial, Makalah Diskusi Pakar tentang Membangun Konsepsi dan Strategi Ketahanan Sosial Masyarakat. Jakarta : Pusbangtansosmas.
- Keck, Markus and Patrick Sakdapolrak, 2013, What Is Social Resilience? Lessons Learned And Ways Forward, dalam Jurnal Erdkunde, Vol 67 No 1, 5-19, Department of Geography University of Bonn, Germany.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) Sebagai Bencana Nasional
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung

Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.259-Hukham/2020 Tentang
Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi Jawa
Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Coronavirus DiSease 2 0 1 9
(Covtd- 1 9)

Laurie Leitch, An Introduction to the Social Resilience Model. Diakses dari
<https://www.thresholdglobalworks.com/about/social-resilience/>, diakses
pada tanggal 31 Mei 2020

Rochman Achwan, 2002. Ketahanan Sosial Komuniti di Indonesia : Beberapa Catatan
Empiris. Makalah Diskusi Pakar tentang Membangun Konsepsi dan Strategi
Ketahanan Sosial Masyarakat. Jakarta: Pusbangtansosmas

Sugiyanto, 2002. Lembaga Sosial. Yogyakarta: Global Pustaka Utama